

## LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN 2

### A. PENDAHULUAN

Program kotaku di Jawa Tengah 1 dilaksanakan di 20 kabupaten/kota. Cakupan lokasi program berdasarkan kategori kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan peningkatan kualitas permukiman dilaksanakan di seluruh kawasan teridentifikasi kumuh yang diusulkan kabupaten/kota. Khusus untuk perbaikan infrastruktur tingkat kota (infrastruktur primer dan sekunder), dukungan investasi dari pemerintah pusat hanya akan diberikan kepada kabupaten/kota terpilih, yang memenuhi kriteria tertentu.
2. Kegiatan pencegahan kumuh dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau kawasan/kecamatan Perkotaan diluar kelurahan/desa kawasan yang teridentifikasi kumuh termasuk lokasi kawasan permukiman potensi rawan kumuh yang diidentifikasi pemerintah kabupaten/kota.
3. Kegiatan pengembangan penghidupan dilakukan di lokasi terpilih.
4. Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP-2).

Seleksi Kabupaten/kota untuk memperoleh dukungan investasi infrastruktur tingkat kota akan dipilih Kabupaten/Kota dari criteria karakteristik penduduk, luas permukiman kumuh, kebutuhan akses terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan dasar dan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh. Adapun tata cara seleksi diatur secara terpisah dalam surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya.

Tim OSP memberikan dukungan kepada PMU dan PIU dalam lingkup pekerjaan berikut ini, namun tidak terbatas kepada:

1. Memastikan pelaksanaan dan pencapaian tujuan program serta target KPI di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kelurahan;
2. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan perencanaan kawasan permukiman di tingkat kabupaten/kota dan kelurahan, termasuk di antaranya kawasan permukiman kumuh;
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembiayaan program dan kegiatan kolaborasi kelembagaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kelurahan;
4. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas dan komunikasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kelurahan;
5. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan infrastruktur di tingkat kabupaten/kota dan kelurahan;
6. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan manajemen keuangan dan dukungan penghidupan berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota dan kelurahan;
7. Melakukan pemantauan dan pengendalian program (monitoring) di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kelurahan, termasuk pelaksanaan uji petik, pengelolaan data dalam MIS/GIS dan pelaporan;
8. Berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif dengan PMU/PIU, Satker/PPK Provinsi dalam melakukan administrasi proyek, seleksi dan rekrutmen, kontrak, penilaian kinerja dan pembayaran tenaga ahli, tim koordinator kota dan tim fasilitator secara berkala;
9. Berkoordinasi dan berkomunikasi intensif dengan PMU/PIU, Satker/PPK Provinsi dan/atau Satker/PPK Kota dalam mengelola pelaksanaan program di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kelurahan;
10. Memastikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lanjutan atau tambahan, jika dibutuhkan sesuai dengan panduan;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana ditetapkan oleh PMU dan/atau Satker.

Capaian KPI Bulan Mei 2019 dari analisa hasil keluaran data SIM periode bulan Mei 2019 masih banyak indikator yang belum tercapai diantaranya adalah Masyarakat di kawasan kumuh yang mendapat perbaikan/peningkatan pembangunan infrastruktur realisasi capaiannya 334.819, Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan akses air minum realisasi capaiannya 15.619, Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan akses sanitasi layak realisasi capaiannya 173.720, Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan akses jalan sepanjang waktu dalam radius 500 realisasi capaiannya 76.472, Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan pembangunan persampahan realisasi capaiannya 139.250, dan Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan pembangunan drainase realisasi capaiannya 88.597.

Hal ini dikarenakan pekerjaan fisik 2019 di lapangan masih belum terlaksana. Di tingkat kelurahan masih dalam tahap pencairan. Berikut capaian KPI OSP 1 Jawa Tengah 1 hingga bulan Mei 2019.

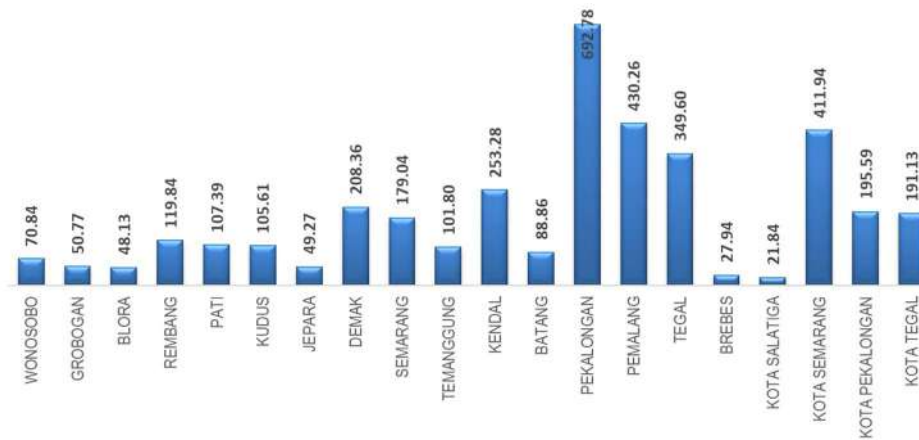
### Capaian KPI Program Kota Tanpa Kumuh Jawa Tengah

NO	INDIKATOR	Satuan	Target	Realisasi	GAP
<b>INDIKATOR HASIL (PDO Indicators)</b>					
1	Masyarakat di kawasan kumuh yang mendapat perbaikan/peningkatan pembangunan infrastruktur	orang (persons)	952,429	334,819	617,610
2	Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan akses air minum : Dipilah laki-perempuan	orang (persons)	56,463	15,619	40,844
3	Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan akses sanitasi layak : Dipilah laki-perempuan	orang (persons)	87,428	173,720	(86,292)
4	Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan akses jalan sepanjang waktu dalam radius 500 m : Dipilah laki-perempuan	orang (persons)	357,594	76,472	281,122
5	Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan pembangunan persampahan : Dipilah laki-perempuan	orang (persons)	159,119	139,250	19,869
6	Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan pembangunan drainase : Dipilah laki-perempuan	orang (persons)	448,643	88,597	360,046
7	Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Ha	1,711		
8	Persentase masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh merasa puas terhadap kualitas dan pelayanan pembangunan infrastruktur perkotaan	%			
9	Persentase pengaduan masyarakat tertangani dan selesai	%	90%	100%	
10	Pokja PKP tingkat Kab/Kota dan Provinsi terbentuk dan berfungsi	%	80%		
11	Jumlah penerima manfaat langsung program	orang (persons)	938,394	185,994	
12	Jumlah penerima manfaat perempuan program	orang (persons)	469,197	94,844	
<b>INDIKATOR HASIL ANTARA (Intermediate Results Indicators)</b>					
<b>1. Komponen-1 : Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan (Institutional and Policy)</b>					
1.1	Pokja PKP tingkat nasional terbentuk dan berfungsi	ya (yes)			
1.2	Tersedianya database/Profil kawasan permukiman kumuh	ya (yes)	Ya		
<b>2. Komponen-2 : Dukungan perencanaan terintegrasi and Penguatan kapasitas bagi pemda dan</b>					
2.1	Persentase pemda yang telah menyelesaikan dokumen SIAP/RP2KP-KP dan telah disahkan oleh Bupati/Walikota	%	90%	85%	
2.2	Persentase kelurahan yang telah menyelesaikan dokumen RPLP dan telah dikonsolidasikan kedalam dokumen SIAP/RP2KP-KP	%	90%		
<b>3. Komponen-3 : Infrastruktur Perkotaan dan pelayanan di Kota Prioritas (Urban infrastructure and</b>					
3.1	Jumlah kota yang telah menyelesaikan 80% pembangunan infrastruktur primer dan sekunder dan pelayanan yang terhubung dengan kawasan kumuh	Kota (cities)	11		
3.2	Jumlah kelurahan yang telah menyelesaikan 90% pembangunan infrastruktur tersier dan pelayanan di kawasan kumuh	kelurahans	604	24	
3.3	Persentase infrastruktur dan pelayanan yang dibangun berkualitas baik	%	95%	94%	
3.4	Persentase infrastruktur yang dibangun berfungsi baik	%	85%		

NO	INDIKATOR	Satuan	Target	Realisasi	GAP
<b>4. Komponen-4 : Dukungan pelaksanaan dan Bantuan Teknis (<i>Impelmtation support</i>)</b>					
4.1	Persentase pemda yang memiliki struktur monitoring dan mengembangkan sistem informasi pelaksanaan proyek secara teratur	%	90%		
4.2	Persentase kelurahan yang telah melaksanakan audit keuangan tahunan	%	95%	8%	

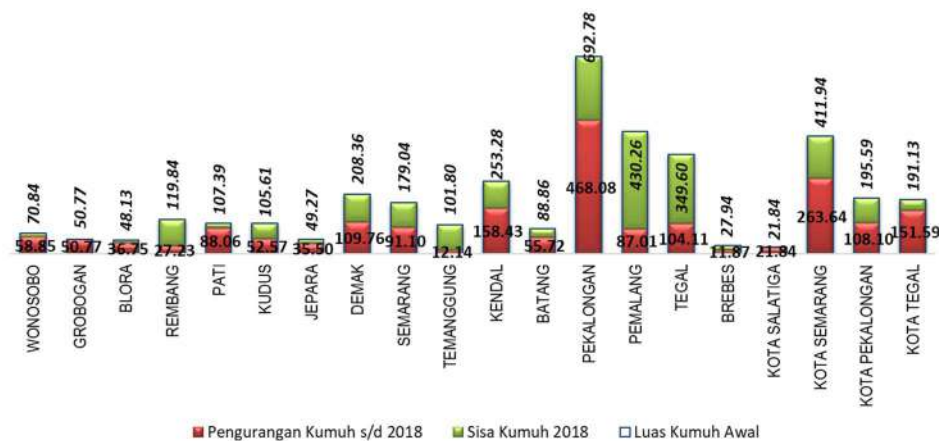
Capaian pengurangan kumuh sampai dengan bulan Mei 2019 posisinya masih sama dengan capaian pada akhir Desember 2018. Hal ini karena kegiatan pembangunan infrastruktur baik dari BPM KOTAKU (NSUP) maupun kegiatan-kegiatan yang didanai APBD, APBN, maupun Kolaborasi sampai akhir bulan Mei 2019 belum berjalan (Masih dalam tahap pencairan)

Luas kumuh AWAL di wilayah dampingan OSP 1 adalah 3.704,27 Ha. Jumlah 2.779,25 Ha merupakan luas kumuh Flag 1 (Target RPJMN) dan 925,01 ha merupakan luas kumuh Flag 2. Kabupaten Pekalongan memiliki wilayah kumuh terluas di OSP 1 yaitu 692,78 ha, Kabupaten Pemalang memiliki wilayah kumuh seluas 430,26 ha, Kota Semarang memiliki wilayah kumuh seluas 411,94 ha. Kabupaten/Kota lain memiliki wilayah kumuh dibawah 400 ha. Perbandingan jumlah wilayah kumuh di tiap kabupaten/kota lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



#### Luas Kumuh Awal Kabupaten/Kota OSP-1 Jawa Tengah-1

Capaian penanganan kumuh sampai dengan tahun 2018 khusus wilayah OSP 1 Jawa Tengah-1 seluas 1.993,11 Ha sehingga sisa luas kumuh target RPJMN pada awal tahun 2019 seluas 965,62 Ha ditambah luas kumuh flag-2 seluas 745,53 Ha, total seluas 1.711,15 Ha.



Perbandingan Luas Kumuh Awal Kabupaten/Kota OSP-1 Jawa Tengah-1, Capaian Pengurangan s/d 2018 dan Sisa Kumuh 2018

No.	Kode	Kota/Kab.	Luas Kumuh Awal			Capaian Pengurangan Kumuh Sampai 2018	Sisa Kumuh 2018		
			Flag 1	Flag 2	Jumlah		Flag 1	Flag 2	Jumlah
1	3307	WONOSOBO	70.84	-	70.84	58.85	11.98	-	11.98
2	3315	GROBOGAN	50.77	-	50.77	50.77	-	-	-
3	3316	BLORA	48.13	-	48.13	36.75	11.39	-	11.39
4	3317	REMBANG	59.53	60.32	119.84	27.23	32.29	60.32	92.61
5	3318	PATI	107.39	-	107.39	88.06	19.33	-	19.33
6	3319	KUDUS	95.06	10.55	105.61	52.57	44.22	8.83	53.04
7	3320	JEPARA	49.27	-	49.27	35.50	13.77	-	13.77
8	3321	DEMAK	38.15	170.21	208.36	109.76	7.54	91.06	98.60
9	3322	SEMARANG	179.04	-	179.04	91.10	87.94	-	87.94
10	3323	TEMANGGUNG	8.34	93.46	101.80	12.14	4.11	85.55	89.66
11	3324	KENDAL	230.18	23.10	253.28	158.43	79.21	15.64	94.85
12	3325	BATANG	88.86	-	88.86	55.72	33.14	-	33.14
13	3326	PEKALONGAN	614.52	78.26	692.78	468.08	150.73	73.97	224.70
14	3327	PEMALANG	240.74	189.52	430.26	87.01	155.46	187.79	343.25
15	3328	TEGAL	50.00	299.60	349.60	104.11	23.11	222.38	245.49
16	3329	BREBES	27.94	-	27.94	11.87	16.07	-	16.07
17	3373	KOTA SALATIGA	21.84	-	21.84	21.84	-	-	-
18	3374	KOTA SEMARANG	411.94	-	411.94	263.64	148.30	-	148.30
19	3375	KOTA PEKALONGAN	195.59	-	195.59	108.10	87.49	-	87.49
20	3376	KOTA TEGAL	191.13	-	191.13	151.59	39.54	-	39.54
<b>TOTAL</b>			<b>2779.2518</b>	<b>925.01318</b>	<b>3704.265</b>	<b>1,993.11</b>	<b>965.62</b>	<b>745.53247</b>	<b>1711.1543</b>

Sisa kumuh pada akhir Mei 2019 adalah 1.711,15 Ha yang terdiri dari 965,62 Ha Flag 1 dan 745,53 Ha (merupakan sisa luas kumuh Desember 2018).

Kebutuhan dana BPM tahun 2019 di wilayah Jateng-1 berjumlah Rp 172 Milyar, sementara dana yang tersedia di DIPA PIP baru Rp. 45.150 Milyar. Lokasi BPM tahun 2019 tersebar 129 kel/desa di 19 kota/kabupaten. Jika dilihat dari kesiapan pencairan berdasarkan kelengkapan administrasi Pejabat Inti Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIS Satker PIP) Kabupaten/Kota ada potensi beberapa kabupaten/Kota tidak bisa menyerap DIPA Original (DIPA awal) karena adanya perubahan Pejabat Inti Satker PIP [usulan baru]. Pencairan harus menunggu sampai terbitnya SK Satker PIP baru dari Kementerian PUPR karena beberapa KPPN mempersyaratkan SK Satker PIP 2019 jika usulan PIS Satker PIP tahun 2019 berbeda dengan SK Satker PIP tahun 2018. Hal ini berakibat ada beberapa kabupaten/kota yang belum dapat mencairkan DIPA Original karena menunggu SK Satker PIP 2019. Dari 20 kabupaten/kota wilayah dampingan OSP 1 Jawa Tengah-1 sebanyak 16 kabupaten/kota memiliki DIPA Original BPM tahun 2019, dari jumlah tersebut ada 6 kabupaten/kota yang mengajukan perubahan Pejabat Inti Satker PIP karena adanya perubahan SOTK di Pemda tersebut atau ada pejabat yang memasuki usia pensiun dan ada yang meninggal dunia. Dengan demikian 6 kabupaten/kota tersebut tidak dapat segera melakukan pencairan BPM 2019.

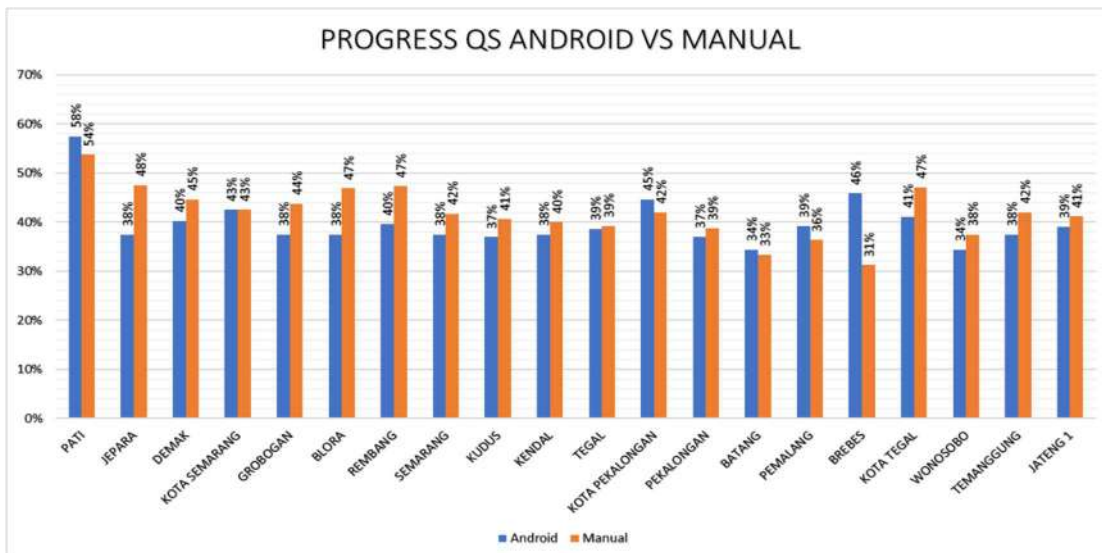
Potensi DIPA Ori yang dapat dicairkan pada bulan April 2019 sebesar Rp 24.100.000.000 (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Juta rupiah) belum dapat dicairkan semua atau belum tercapai dari target. Namun demikian hingga akhir bulan Mei 2019, 11 Kota/Kab dapat berproses SPM dan SP2D untuk 21 Kel senilai 18,2 Milyar, Capaian emon pada bulan Mei 2019 baru sekitar 15 kel senilai 12,95 Milyar. Selanjutnya apabila dilihat dari Kebutuhan dana BPM tahun 2019 di wilayah Jateng-1 berjumlah Rp 172 Milyar, sementara dana yang tersedia di DIPA PIP baru Rp. 45.150 Milyar. Lokasi BPM tahun 2019 tersebar 129 kel/desa di 19 kota/kabupaten.

Pasca terbitnya DIPA Revisi pada akhir bulan Mei 2019, perkembangan capaian pencairan termin 1 [70%] untuk OSP 1 Jawa Tengah sampai akhir bulan Juni 2019 adalah 12 Kota/Kab dapat berproses SPM dan SP2D untuk 66 Kelurahan/Desa senilai Rp. 56.983.500.000 capaian Emon baru di 43 kelurahan/Desa senilai Rp. 39.133.500.000, belum semua terentry oleh petugas emon.

Dengan kesiapan dan perencanaan skala lingkungan dari Konsep Desain Penataan Lingkungan Permukiman (Siteplan) sampai dengan kesepakatan harga dan swadaya sudah berproses 100% di 129 Kelurahan, Progres perencanaan khususnya Dokumen teknis masih 96.12% terjadi keterlambatan dari jadwal yang sudah direncanakan 29 Maret 2019 yang seharusnya kegiatan tersebut selesai dikarenakan beberapa hal diantaranya adanya pergantian personel dilapang sehingga masih memerlukan waktu untuk orientasi dan beberapa kota kabupaten bersamaan dengan audit oleh BPKP. Disamping itu juga pada awal bulan April 2019 tim OSP 1 Jawa Tengah telah melakukan kegiatan pengendalian terkait kualitas dan kuantitas dari kesiapan kelengkapan dokumen teknis.

KEGIATAN	REALISASI TOTAL			
	BELUM (kel.)	PROSES (kel.)	SELESAI	
			(kel.)	(persen)
<b>QS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN SKALA LINGKUNGAN</b>				
<b>A. PERSIAPAN DAN PERENCANAAN</b>				
1. Konsep Desain Penataan Lingkungan Permukiman (Siteplan)	0	0	129	100.00%
2. Seleksi Kegiatan Prioritas	0	0	129	100.00%
3. Konsultasi dan sosialisasi dengan Pemda/Instansi Terkait	0	0	129	100.00%
4. Identifikasi Dampak dan rencana pengelolaan	0	0	129	100.00%
5. Pemaketan pekerjaan	0	0	129	100.00%
6. Pembentukan KSM/panitia	0	0	129	100.00%
7. Pembentukan/ Revitalisasi KPP	0	0	129	100.00%
8. Survei teknis/lokasi	0	0	129	100.00%
9. Survei harga satuan Upah/material/alat	0	0	129	100.00%
10. Kesepakatan harga dan Swadaya	0	0	129	100.00%
11. Penyusunan DED,RAB,RKS dan jadwal	1	2	126	97.67%
12. Verifikasi oleh Askot infra	1	8	120	93.02%
13. Penandatanganan SPK BKM dengan PPK	66	8	55	42.64%
14. Pemberkasan Pencairan Tahp 1	56	12	61	47.29%
15. Penyusunan Rencana Kerja KSM	24	0	105	81.40%
16. Verifikasi Rencana Kerja KSM oleh Faskel teknik dan UPL	34	0	95	73.64%

Sedangkan perkembangan KEGIATAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN SKALA LINGKUNGAN TA. 2019 secara manual data versi Infra deviasi data kurang dari 10% atas perbandingan QS Android vs QS Manual



## Tujuan uji petik

Tujuan uji petik (spot check), untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai kerangka waktu yang direncanakan dan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman program. Dan sebagai bagian dari upaya pengendalian serta pemastian untuk menghasilkan output yang berkualitas serta pencapaian outcome yang optimal. Bila ditemukan penyimpangan (deviasi) pada saat uji petik, maka dilakukan saran/rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pelaku di tingkat lapangan dalam kurun waktu yang disepakati bersama

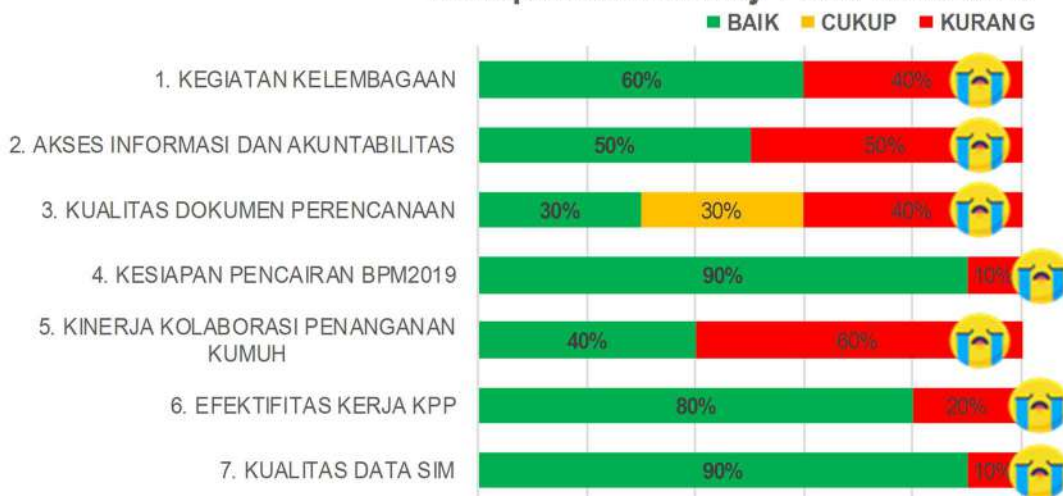
## Rekapitulasi Lokasi uji petik

Realisasi Pelaksanaan Ujipetik dilakukan di OSP 1 Jateng sebanyak 10 kelurahan/Desa, dengan jadwal pelaksanaan mulai tanggal 13 Juni sampai dengan 27 Juni 2019, Realisasi Sebaran lokasi kab dan kelurahan/desanya ;

KD_KAB	NAMA_KAB	Jml_Kel BPM	RENCANA UJI PETIK	
			Kel/Desa	Tanggal
3307	WONOSOBO	1	JARAK SARI	26 Juni 2019
3317	REMBANG	6	GEDONGMULYO	27 Juni 2019
3318	PATI	2	BENDAR	25 Juni 2019
3320	JEPARA	3	BULU	26 Juni 2019
3325	BATANG	3	KARANGASEM UTARA	25 Juni 2019
3329	BREBES	3	DUKUH TURI	14 Juni 2019
3376	KOTA TEGAL	6	MINTARAGEN	13 Juni 2019
			PESURUNGAN KIDUL	
3326	PEKALONGAN	21	PECAKARAN	22 Juni 2019
3375	KOTA PEKALONGAN	7	PONCOL	24 Juni 2019
	7	24	10	

## B. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU

### Rekapitulasi Hasil Uji Petik Triwulan 2



Kesiapan kegiatan kelembagaan, kesiapan pencairan BPM 2019, efektifitas kerja KPP dan kualitas data masuk dalam kategori baik sedangkan kualitas dokumen perencanaan masih perlu perbaikan Desain infrastruktur, Gambar belum disesuaikan dengan kondisi lapang, RAB belum sesuai dengan metodologi, dan Kelengkapan Dokumen

TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
Kegiatan Kelembagaan	Baik : 6Kel/60% Cukup : 0Kel/0% Kurang : 4Kel/40%	Kegiatan Audit LKM dilakukan setiap tahunnya melalui KAP dan ada yang dibiayai oleh dana APBD sharing hingga 80% [kolaborasi], namun untuk opini lama keluarnya. Penilaian evaluasi kinerja kelembagaan dilakukan 2x dalam setahun dengan status rata-rata mandiri LKM belum memahami konsep dan metodologi evaluasi kinerja kelembagaan Forum kolaborasi banyak yang belum terbentuk ditingkat kelurahan System pemilihan ulang LKM sudah sesuai ketentuan	KAP terlalu banyak menerima pekerjaan Semua anggota LKM baru, hasil pemilu Forum kolaborasi belum tersosialisasikan konsepnya	Rutin berkoordinasi dengan dengan KAP agar opini segera keluar Bedah bersama metodologi evaluasi kinerja LKM dan lakukan penguatan tentang tatacara penilaian kinerja LKM Fasilitasi rapat LKM untuk menyusun rencana kerja Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan dan rencana kerja forum kolaborasi
Akses Informasi dan Akuntabilitas	Baik : 5Kel/50% Cukup : 0Kel/0% Kurang : 5Kel/50%	LKM sudah mengelola PIM dan tertib tercatat dalam buku pengaduan namun sebagian ada belum mengelola PIM secara baik dan terukur	Kurang nya pemahaman tentang PIM sebagai bagian dari control dan partisipasi masyarakat	Penguatan untuk pelaksanaan PIM dan fasilitasi sekretaris LKM untuk mengelola buku PIM
Kualitas dokumen perencanaan teknis	Baik : 3Kel/30% Cukup : 3Kel/30% Kurang : 4Kel/40%	Kesiapan dokumen teknis sudah disusun, namun desain dan gambar belum disesuaikan dengan kondisi lapangan RAB belum sesuai dengan metodologi Dokumen teknis belum lengkap	Gambar belum ada arah aliaran air, tidak ada potongan per STA, gambar warga terdampak dan surat lahan belum di buat Pekerjaan pendukung belum dihitung, harga satuan belum sesuai dengan penyepakatan, nilai kegiatan belum memenuhi pagu Isi dan tanda tangan belum lengkap	Perbaikan desain infrastruktur Fasilitasi pengukuran elevasi, menambahkan arah aliran air pd gambar Gambar rencana disesuaikan dengan kondisi lapang/STA [potongan memanjang didukung pengukuran] Perbaikan RAB dan harga satuan kembali ke POS infra Perbaikan dan melengkapi dokumen

<b>TOPIK</b>	<b>CAPAIAN KUANTITATIF</b>	<b>ISU/CATATAN LAPANGAN</b>	<b>FAKTOR PENYEBAB</b>	<b>REKOMENDASI</b>
Kesiapan proses pencairan BPM 2019	Baik : 9Kel/90% Cukup : 0Kel/0% Kurang : 1Kel/10%	Belum dilakukan SPK LKM dengan PPK Surat lahan belum dibuat tiap rumah, pemindahan tiang belum jelas	PPK sangat perfect dalam mengawal/verifikasi dokumen teknik agar kualitas bisa terjamin. Kurang memahami Safeguard lingkungan dan social serta kelengkapan/dan kesiapan lainnya	Tim korkot melakukan dan memastikan pendampingan yang intens terhadap dokumen teknik agar secepatnya fasilitasi SPK Peningkatan kapasitas terkait safeguard lingkungan dan social Fasilitasi kejelasan lahan yang terkena dampak
Kinerja kolaborasi penanganan kumuh	Baik : 4Kel/40% Cukup : 0Kel/0% Kurang : 6Kel/60%	Kolaborasi sudah dilakukan secara integrative oleh berbagai pihak menjawab kebutuhan dalam RPLP dan menyelesaikan permasalahan kumuh	Kebutuhan dana untuk melakukan suatu kegiatan infrastruktur untuk penanganan kumuh tidak tercukupi	Perlu ditingkatkan dan dipastikan lagi sesuai prioritas penanganan kumuh
Efektifitas kerja KPP	Baik : 8Kel/80% Cukup : 0Kel/0% Kurang : 2Kel/20%	Masih mengikuti pola O&P dan belum memiliki rencana kerja Belum ada pengelolaan keuangan yang baik Dana swadaya dari Pemkot senilai 6jt/tahun	Belum tersosialisasikan KPP ditingkat kelurahan	Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan KPP Fasilitasi penyusunan rencana kerja, kapasitas teknik, penyepakatan pengelolaan keuangan dan rencana anggaran belanja KPP Fasilitasi perdes/kelembagaan KPP
Kualitas data SIM tahap persiapan & perencanaan	Baik : 9Kel/90% Cukup : 0Kel/0% Kurang : 1Kel/10%	Data SIM sudah sesuai dengan kondisi riil dilapang, sebagian masih ada yang tidak sesuai	Data belum dientry	Update Data SIM

---